Jurnal Publikasi Pendidikan
http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend
Volume 10 Nomor 1, Februari 2020
p-ISSN 2088-2092 e-ISSN 2548-6721

Submitted : 13/01/2020
Reviewed : 06/02/2020
Accepted : 11/02/2020
Published : 29/02/2020

Pemetaan Kompetensi Kepala SD di Kota Makassar

Ratmawati[1], Ismail Tolla[2], Andi Wahed[3]
[1,2,3]Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar
[1]ratmawati@unm.ac.id
[2]ismail.tolla@yahoo.com
[3]andi.wahed@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penguasaan dimensi kompetensi kepala sekolah khususnya bagi Kepala Sekolah Dasar di Kota Makassar berdasarkan Standar Kompetensi Kepala Sekolah/madrasah yang meliputi: (1) dimensi kompetensi kepribadian, (2) dimensi kompetensi sosial, (3) dimensi kompetensi manajerial, (4) dimensi kompetensi supervisi, dan (5) dimensi kompetensi kewrausahaan". Jenis penelitian adalah penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mencari kedudukan, fenomena untuk mngetahui status dengan cara membndingkan dengan standar yang telah ditentukan. Subjek penelitian adalah 153 kepala sekolah SD yang tersebar di lima wilayah kecamatan di Kota Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tes sebagai instrumen utama, dokumentasi, dan observasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis pesentase. Berdasarkan hasil pemetaan kompetensi kepala sekolah dasar pada dimensi kompetensi Hasil analisis data pemetaan dimensi kompetensi kepribadian hanya mencapai 68% berada pada kategori sedang, dimensi kompetensi manajerial mencapai 72% atau berada pada kategori tinggi, demensi kometensi supervise akademik hanya mencapai 61% atau berada pada kategori sedang, dimensi kompetensi kewirausahaan menunjukkan penguasaan 53% atau berada pada kategori rendah dan dimensi kompetensi social mencapai 61% atau berada pada kategori sedang. Dan secara keseluruhan rata-rata penguasaan dimensi kompetensi kepala sekolah dasar dari lima dimensi berada pada pencapaian 65% atau berada pada kategori sedang dan hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh LPPKAS pada tahun 2010.

Kata kunci: *pemetaan kompetensi, kepala sekolah*

ABSTRACT

This study aims to map the control of the dimensions of competence principals particularly for Head Elementary School in Makassar based Competency Standards Principal / madrasah which includes: (1) the dimensions of personal competence, (2) the dimensions of social competence, (3) the dimensions of managerial competence, (4) dimensions supervision competence, and (5) the dimensions of entrepreneurial competence". This type of research is a survey research using qualitative descriptive approach that aims to seek the position, a phenomenon to know status by deference with the specified standard. Subjects were 153 elementary school principals in five sub-districts in Makassar sampled in this study. Data collection techniques used were a test as the main instrument, documentation, and observation, as well as data analysis technique used is the technique of Persentage analysis. Based on the results of competency mapping the principal basis on dimensions of competence Results of the data analysis mapping the dimensions of personal competence only reached 68% in the moderate category, the dimensions of managerial competence reaches 72% or at the high category, dimensions of supervision academic competence only reached 61% or that are in the category medium, dimensions of entrepreneurial competence demonstrated mastery is at 53% or lower categories and dimensions of social competence at 61% or middle category. And overall average dimensions of competency mastery basic principal of the five dimensions that are in attainment of 65% or middle category and the results of this study are not much different from the results of research conducted by LPPKAS in 2010.

Keywords: *competence mapping, Principal*

PENDAHULUAN

Kualitas kompetensi kepala sekolah merupakan titik tumbuhnya inovasi dalam arti kualitas. Posisi strategis kepala sekolah sebagai agen perubahan dalam memacu kualitas pendidikan di sekolah, kualitas kompentensi kepala sekolah sangat menentukan. Kepala sekolah di banyak negara mengalami posisi sulit, karana mereka diharapkan mengelola proses pendidikan dengan kualitas lebih baik dalam kondisi semakin menyusutnya sumberdaya. Sekalipun sebagian besar kepala sekolah menghadapi masalah yang sedemikian rumit, masih ada negara yang secara sungguh-sunguh memikirkan isu yang berkaitan penyeleksian, pengangkatan, dan pelatihan bagi kepala sekolah.

Di Indonesia pengangkatan kepala sekolah diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 pasal 1 Ayat (1) menyatakan kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin…satuan penidikan mulai taman kanak-kanak/raudhotul sampai, sekolah menengah atas (SMA/MA dan SMK/MAK). Oleh karena jabatan kepala sekolah hanya merupakan tugas tambahan, dalam kenyataan banyak diantaranya yang tadinya berkinerja sangat bagus ketika sebagai guru, menjadi tumpul setelah menjadi kepala sekolah. Hal ini terjadi karena hakekat jabatan kepala sekolah adalah jabatan manajerial yang kompetensinya berbeda dengan kompetensi guru. Praktik pengangkatan kepala sekolah yang direkrut dari guru sebagaimana diattur dalam Permendiknas nomor 28 Tahun 2010 tersebut, ternyata banyak kepala sekolah yang belum memiliki persiapan untuk mengemban tugas kepala sekolah. Sebagai solusinya penyiapan kepala sekolah diatur dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekola/Madrasah yang mencakup lima dimensi kompetesi Kepala Sekola/Madrash menjadi syarat dalam penyiapan kepala sekolah professional. Kelima dimensi kompetensi kepala sekola/madrasah meliputi: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompensi supervisi akademik, (4) kompetensi kewirausahaan, dan (5) kompetensi sosial.

Melalui Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tersebut, menjadi pendorong timbulnya kebutuhan peningkatan kompetensi kepala sekolah secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan peningkatan kompetensi kepala sekolah antara lain:

1) Keinginan untuk menjadi kepala sekolah lebih kompeten,
2) Beragamnya latar pengalaman kepala sekolah sebelum diangkat menjadi kepala sekolah,
3) Laporan pengawasan kinerja kepala sekolah,
4) Adanya perbedaan kedewasaan kepala sekolah,
5) Keinginan untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi,
6) Perubahan sikap masyarakat, kalangan professional, dan manajemen,
7) Adanya kebutuhan akuntabilitas kepada orang tua peserta didik, masyarakat, dan peserta didik.
8) Keinginan kepala sekolah untuk lebih mandiri (Depdiknas, Pusat Diklat Pegawai).

Kenyataan bahwa harapan kepada kepala sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Antara lain pemicunya adalah kualitas kompetensi kepala sekolah yang belum memadai. Hasil survai nasional menunjukkan bahwa penguasaan lima dimensi kompetensi kepala sekolah belum merata, sebagaimana hasil pemetaan kompetensi kepala sekolah/madrasah yang dilakukan secara nasional oleh Lembaga Pengmbangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) se-Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat penguasaan standar kompetensi kepala sekolah/madrasah untuk dimensi: kepribadian: 85%, manajerial: 74%, supervisi: 72%, kewirausahaan: 74%, dan sosial: 63%. Rata-rata penguasaan dari kelima dimensi kompetensi tersebut secara nasional baru

mencapai 76% (Sumber: Data LPPKS tahun 2012).

Data tersebut menggambarkan masih ada kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah/madrasah di Indonesia belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan (standar). Sehubungan dengan itu, penelitian ini juga mengkaji kompetensi kepala sekolah di Sulawesi Selatan dan lebih difokuskan di Kota Makassar lokasi penelitian. Pemilihan Kota Makasar sebagai lokus penelitian atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Kota Makassar dipandang sebagai refresentasi kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan, karena disamping sebagai ibu kota provinsi juga memiliki sarana dan fasilitas yang lebih baik dari kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan,
b. Kualitas sumber daya kepala sekolah di Kota Makssar baik dari segi kualifikasi maupun jumlah yang sudah mengikuti diklat kekepalasekolahan lebih banyak disbanding kabupten/kota lainnya.

Terpetakannya kualitas kompetensi kepala sekolah di Kota Makassar melalui hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk penyusunan program peningkatan kualitas kompetensi kepala sekolah.

A. Kompetensi Kepala Sekolah

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Dari Permen tersebut, ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah pada jenjang satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai SLTA.

Standar kualifikasi kepala Sekolah/Madrasah dalam Permendiknas tersebut terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum meliputi: (1) kualifikasi akademik (S-1) atau D4) (2) usia tertinggi 56 tahun, (3) pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, dan pangkat serendah-rendahnya III/c. Untuk kualifikasi khusus disesuaikan dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan. Standar kompetensi kepala sekolah, berdasarkan Permen tersebut dirumuskan lima dimensi kompetensi, yaitu: (1) dimensi kompetensi kepribadian, (2) dimensi kompetensi manajerial, (3) dimensi kompetensi kewirausahaan, (4) dimensi kompetensi supervisi, dan (5) dimensi kompetensi sosial. Dari kelima dimensi standar kompetensi kepala sekolah tersebut, mengindikasikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan hanya sebagai jabatan administratif (struktural) tetapi lebih merupakan jabatan akademik yang profesional.

Sebagai bukti kontribusi kepala sekolah sebagai manajer pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan, seperti dilaporkan oleh Bank Dunia dalam "basic education study" (1989), hasil studi Heyneman & Loxly (1983) dalam Achmady (1995), penelitian dilakukan di 29 negara: 16 negera berkembang dan 13 negara maju, menunjukkan bahwa dari empat faktor yang memberikan kontribusi paling menentukan mutu pendidikan di sekolah salah satunya adalah manajemen kepala sekolah, sejajar dengan kontribusi guru, waktu belajar siswa dan sarana-prasarana fisik sekolah. Kontribusi dari keempat faktor tersebut, dikemukakan sebagai berikut: Di negara-negara berkembang kontribusi peranan guru 34 %; manajemen kepala sekolah 22%; waktu belajar siswa 18%; dan sarana fisik 26%. Di negara-negara industri maju kontribusi peranan guru 36%; manajemen kepala sekola 23%; waktu belajar siswa 22%, dan sarana fisik 19%.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keprofesionalan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, salah satu strategi pemberdayaan manajer pendidikan dalam konteks birokrasi di era otonomi daerah adalah melalui rekrutmen berdasarkan kompetensi latar belakang keahlian. Namun, hal ini akan sangat bergantung kepada kepentingan politik oleh top leader di setiap daerah otonom yang dalam hal ini "Gubernur dan Bupati/Walikota" sejauh mana memberikan penekanan terhadap kompetensi dalam rekrutmen para manajer pendidikan pada semua lini birokrasi pendidikan mulai dari Kepala Dinas

Pendidikan sampai pada level paling bawah, yaitu kepala sekolah.

Urgensi dan signifikansi peranan dan fungsi kepala sekolah berdasarkan teori maupun pengalaman empiris dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sekolah merupakan keberhasilan kepala sekolah karena kepala sekolah sebagai manajer satuan pendidikan.

Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memiliki kompetensi yang tangguh untuk dapat merealisasikan visi, misi dan tujuan dalam mengembangkan sekolahnya.

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, pasal 12 ayat (4) meliputi tiga bidang pokok, yaitu: (1) usaha pengembangan sekolah/madrasah; (2) peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan; dan (3) usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.

Untuk mewujudkan ketiga tugas pokok tersebut yang merupakan peranan strategis kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan memerlukan kompetnsi ilmiah dan sikap ilmiah sebagai syarat utama yang harus dipenuhi.

Kompetesi ilmiah terefleksikan, seperti: (1) mengusai secara konseptual dan praktis standar kompetensi kepala sekolah, (2) menguasai metode kerja ilmiah, dan (3) menguasai prinsip dasar penggunaan IT dalam pelaksaan tugas.

Soft skill (sikap ilmiah), seperti: (1) visioner; (2) transfomatif; (3) rasa ingin tahu; (4) demokratis, (5) konsisten, (6) komitmen, (7) inovatif, dan akuntabel kepada warga sekolah, orang tua dan masyarakat. Dalam bentuk perilaku kepala sekolah yang dapat diidetifikasi melalui kebijakan sebagai pemimpin satuan pendidikan, antara lain seperti perilaku berikut ini.

1) Memberdayakan dan mendayagunakan pendidik (guru) dan tenga kependidikan berdasarkan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik;
2) Mengembangkan profesionalisme pendidik termasuk pemanfatan TIK;
3) Mengembangkan jejaring kemitraan melalui MOU.

Keefektifan kepala sekolah sebagai manajer satuan pendidikan dapat dilihat dari: (1) mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pebelajaran dengan baik, lancar dan produktif, (2) dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, (3) mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan, (4) berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai di sekolah, (5) bekerja dengan tim manajemen serta, (6) berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Lebih khusus, Bordman, dkk (1961) menyatakan bahwa seorang kepala sekolah harus mampu mengembangkan kemampuan profesional guru, mengembangkan program supervisi, dan memotivai guru untuk berpartisipasi aktif di dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Indikator kualitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan manajemen sekolah dan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilihat dan diukur dari beberapa kriteria aspek pelayanan manajemen pendidikan di sekolah, seperti:

1. Apakah layanan manajemen sekolah, mempermudah akses layanan pendidikan kepada semua komunitas pendidikan di sekolah dan masyarakat?
2. Apakah pemberdayaan guru-guru telah diberdayakan dan dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah utamanya dalam proses pembelajaran.
3. Apakah layanan siswa telah di akui dan diperlakukan sebagai subjek pembelajaran sejati yang memiliki bakat, minat serta potensi untuk berkembang? Dan
4. Apakah semua daya dukung pembelajaran di sekolah telah tersedia untuk memperlancar proses

pembelajaran sehingga terlaksana secara optimal? (hasil monitoring implementasi MBS di Sul-Sel) Tolla dan Ratma: (2014.)

Murphy (1993) dalam Harris (2001) mngidentfkasi 8 peranan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah modern: (1) kepala sekolah sebagai pemimpin altruistik; (2) kepala sekolah sebagai teladan; (3) kepala sekolah sebagai arsitek organisasi; (4) kepala sekolah sebagai artsitek social; (5) kepala sekolah sebagai pendidik; (6) kepala sekolah sebagai pelayan; (7) kepala sekolah sebagai bagian dari komunitas; dan (8) kepala sekolah sebagai pembangun kapasitas.

Dari beberapa sumber yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan secara hipotetik bahwa besar-kecilnya perubahan (positif) yang terjadi di sekolah adalah determinasi kualitas kepempinan kepala sekolah. Oleh karena itu, promosi kepala sekolah disamping memenuhi persyatan administratif yang lebih penting adalah syarat keprofesionalan.

Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah menetapkan tiga tugas dan fungsi pokok (tupoksi) kepala sekolah seagai perwujudan kepemimpinnnannya, yaitu: (1) pengembangan sekolah, (2) peningkatan kualitas, dan (3) pengembangan profesionalisme guru.

Tupoksi kepala sekolah yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan tugas profesional guru adalah fungsi pengembangan profesionalisme guru. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, Dares dan Playco (1995) mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran sebagai kegiatan memimpin para guru agar mengajar lebih baik, yang pada gilirannya dapat memperbaiki prestasi belajar siswanya (LPPKS, 2013). Richard, Andrews (1989) dalam Marzano (2005) juga mengidentifiksi empat peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu: (1) penyelia sumber daya, (2) sumber daya pembelajaran, (3) komunikator, (4) kehadiran yang dapat terlihat.

Dengan menelaah peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, tersirat bahwa kepala sekolah bukan hanya merupakan jabatan karir tetapi lebih berorientasi pada jabatan akademik profesional yang memiliki standar kompetensi seperti halnya guru yang dipersiapkan melalui pendidikan profesi.

Jadi posisi kepala sekolah sebagai manajemen puncak dalam mendelegasikan tugas dan wewenang disesuaikan dengan posisi masing-masing denmikian juga keterampilan manajerial yang dibutuhkan oleh setiap posisi itu.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diketik dengan huruf besar [*font Times New Roman* 12 bold, tengah, background hitam]. Metode penelitian menjelaskan tentang: pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi operasional variable/ deskripsi fokus penelitian, tempat, populasi dan sampel/informan, bahan dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data [*font Times New Roman*, 11, Normal]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Populasi penelitian adalah Kepala Sekolah Dasar se-Kota Makssar. Instrumen penelitian meliputi Tes, dokumentasi dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis presentase dengan prosedur: 1)Menetapkan standar skor secara kategori 2)Skor individu pada setiap dimensi kompetensi diklasifikasi secara frekwensi, Hasil kwalifikasi frekwensi dipresentase berdasrkan kategori rentang skor yang telah ditentukan kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ditetapkan kedalam empat kategori: Sangat kompeten (80% keatas), kompeten (70%-79%), kurang kompeten (60%-69%) dan sangat tidak kompeten (50%-59%).

Tabel 3.2 Sampel Penelitian.

NO	NAMA SEKOLAH	POPULASI (Guru)
1	Kec. Biringkanaya	37
2	Kec. Rappocini	40
3	Kec. Tamalanrea	26
4	Kec. Tamalate	36

5	Kec. Panakukang	34
TOTAL		163

Sampel lokasi dan subjek penelitian (2016)

HASIL & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Dimensi Kompetensi Kepribadian.

Dimensi kompetensi kepribadian terdiri atas enam kompetensi, yaitu: (1) berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah, (2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, (3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah, (4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, (5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah, dan (6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kepala sekolah dasar yang menjadi sampel di Kota Makassar terhadap dimensi kompetensi kepribadian hanya mencapai 68% berada pada kategori sedang.

2. Deskripsi Dimensi Kompetensi Manajerial

Dimensi kompetensi manajerial memiliki 16 kompetensi, yaitu: (1) menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, (2) mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, (3) memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal, (4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif, (5) menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, (6) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, (7) mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, (8) mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah, (9) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik, (10) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, (11) mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien, (12) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah, (13) mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah, (14) mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, (15) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah dan (16) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkatat penguasaan kepala sekolah dasar (sampel) di kota Makassar untuk dimensi kompetensi manajerial mencapai 72% atau berada pada kategori tinggi.

3. Deskripsi Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik

Deskripsi hasil tes dimensi kompetensi supervise akademik yang terdiri atas unsur 3 kompetensi, yaitu (1) merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, (2) melaksanakan supervise akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise yang tepat, dan (3) menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kepala sekolah (sampel) di Kota Makssar terhadap terhadap demensi kometensi supervise akademik hanya mencapai 61% atau berada pada kategori sedang.

4. Deskripsi Dimensi Kompetensi Kewirausahaan

Deskripsi hasil tes dimensi kompetensi kewirausahaan dengan empat kompotensi yaitu: (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah, (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah dan (5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Hasil analisis data menunjukkan bahwah tingkat pengusaan kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makassar terhadap dimensi kompetensi kewirausahaan menunjukkan penguasaan 53% atau berada pada kategori rendah.

5. Deskripsi Dimensi Kompetensi Sosial

Deskripsi hasil tes kompetensi social yang terdiri atas tiga kompetensi yaitu: (1) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, (2) berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan (3) memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kompetensi social kepala sekola dasar (sampel) di Kota Makassar mencapai 61% atau berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil analisis data pada lima dimensi kompetensi standar kopetensi kepala sekolah/madrasah (Pemendiknas Nomor 13 Tahun 2007) menunjukan bahwa tingkat penguasaan kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makasar setelah dikonsultasikan dengan standar penilaian yang ditetapkan ternyata pada umumnya berada pada kategori sedang.

B. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini secara empiris telah mengungkap peta kompetensi kepala sekolah dasar di Kota Makassar yang meliputi lima dimensi kompetensi yaitu dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi manajerial, dimensi kompetensi supervise akademik, dimensi supervise kewrausahaan, dan dimensi kompetensi social. Adapun tingkat penguasaan kepala sekolah di Kota Makassar tehadap kelima dimensi kompetensi kepala sekolah pemetaannya dideskripsikan berikut.

1. Deskriipsi Demensi Kompetensi Kepribadian

Hasil anasis data menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kepala sekolah dasar di Kota Makassar (sampel) terhadap dimensi kompetensi kepribadian pencapaiannya 68% atau berada pada kategori sedang. Tingkat pencapaian 68% ini termasuk rendah dibandingkan dengan hasil penelitian LPPKS dan LPMP (2010) tingkat pencapaian 85%.

2. Deskripsi Dimensi Kompetensi Manajerial

Dimensi kompetensi manajerial tingkat pencaian kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makassar 72% atau berada pada kategori tinggi. Capaian ini sejajar dengan hasil penelitian LPPKS dan LPM (2010) 74% atau ternyata kedua hasil penelitian sangat bersesuaian.

3. Deskripsi Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik

Tingkat pengusaan kepala sekolah ((sampel) di Kota Makassar terhadap dimensi kompetensi supervisi akademik mencapai 61% atau berada pada kategori sedang. Pencapaian 61% tergolong rendah dibandingkan dengan hasil penelitian LPPKS dan LPMP (2010) menunjukan 72%.

4. Deskripsi Dimensi Kompetensi Kewiirausahaan

Tingkat penguasaan dimensi kompetensi kewirausahaan, kepala sekolah di Kota Makassar hanya mencapai 53% atau berada pada kategori rendah. Sementara hasil penelitian LPPK dan LPMP (2010) sebagai pembanding menunjukkan pencapaian 74%. Perbedaan yang mencolok ini diprediksi terletak pada tingkat kreativitas dan inisiatif setiap kepala sekolah. Contohnya program inovasi kurang berkembang di sekolah dengan alasan klasik dana terbatas. Alasan sepeti ini mengindikasikan inisiatif yang kurang berkembang. Pada hal tuntutan implementasi Manjemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah memacu inisiatif dan kreatifitas sekolah menuju kemandirian. Roh kreatiifitas dan inisiatif berada di dimensi kompetensi kewirausahaan.

5. Deskripsi Dimensi Kompetensi Sosial

Tingkat pencapaian kepala sekolah (sampel) di Kota Makassar terhadap dimensi kompetensi social 61% atau berada pada kategori sedang. Hasil penelitian LPPKS dan LPMP (2010) menunjukkan 63%. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukan persesuaian.

Pembahasan temuan penelitian yang telah disajikan di atas baru berkisar pada telaah kompetensi atau kemampuan akademik kepala sekolah yang disyaratkan Permen Diknas Nomor 13 Tahun 2007 sebagai acuan dengan menggunakan hasil penelitian LPPKS dan LPMP tahun 2010 sebagai pembanding, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan mengaitkan hasil analisis data melaui

teknik dokumentasi seperti telah disajikan pada bab penyajian hasil penelitian.

Pertama, secara umum disimpulakan bahwa tingkat penguasaan kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makassar terhadap lima dimensi kompetensi kepala sekolah secara rata-rata berada pada kategori sedang. Namun secara parsial, terdapat dua dimensi kompetensi yang hasilnya ekstrim yaitu dimensi kompetensi manajerial capaiannya 72% atau pada kategori tinggi dan dimensi kompetensi kewirausahaan capaiannya 53% berada padan kategori rendah.

Dimensi kompetensi manajerial kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makassar tergolong tinggi sementara proses rekrutment kepala sekolah belum mempersyaratkan sertifikat kepala sekolah atau nomor unik kepala sekolah (NUKS) yang diterbitkan oleh LPPKS. Data dari dokemen pengangkatan kepala sekolah di Kota Makassar didominasi oleh pangkat dan golongan IV/a & IV/b. Jadi secara empiris menunjukkan bahwa faktor pengalaman sebagai guru memberi kontribusi cukup besar terhadap kemampuan manajerial kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan Permen Diknas Nomor 28 Tahun 2007 Tengan Penugasan Guru sebaga Kepala Sekolah bahwa kepala sekolah merupakan tugas tambahan dan Permen Diknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah bahwa salah satu syarat kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Ini berarti bahwa factor pengalaman sangat penting untuk jabatan kepala sekolah.

Kedua, hasil penelitian ini juga mnunjukkan tingkat penguasaan kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makassar terhadap dimensi kompetensi kewirausahaan rendah. Hal ini juga perlu pembahasan lebih lanjut. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah merupakan kompetensi pendorong lahirnya inovasi dan motivasi di sekolah. Selain itu juga merupakan refleksi penerapan Majemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bertujuan memberikan kewenangan luas kepada sekolah untuk mengembangkan sekolahnya masing-masing melalui prakarsa, inisiatif, dan kreativitas oleh segenap warga sekolah dan Komite Sekolah yang dikordinasikan oleh kepala sekolah untuk mewujudkan kemandirian sekolah. Namun kenyataannya hanyalah merupakan sebuah kebenaran yang terlupakan. Adanya kebijakan pemerintah tentang pembiayaan sekolah melalui dana BOS dan dana pendidikan gratis yang disertai JUKNIS-nya masing-masing membuat sekolah kehilangan kemadirian untuk berprakarsa dalam memberdayakan potensi sekolah karena harus taat pada JUKNIS. Kedua JUKNIS inilah yang menjadi acuan seluruh kegiatan pengembangan sekolah. Posisi Komite Sekolah yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kepmen Diknas Nomor 044/U/2002 Tentang Pembentukan Komite Sekolah memiliki peran penting sebagai mitra kepala sekolah dalam pengembangan sekolah, namun peran dan fungsinya di sekolah tidak dapat berkembang karena dibatasi oleh kedua JUKNIS tersebut. Semua kegiatan di sekolah yang tidak sesui JUKNIS merupakan pelanggaran yang berimplikasi pada sanksi berupa kehilangan jabatan dan mutasi. Dengan kondisi sekolah seperti ini akan terasa adanya kekangan yang membatasi kreativitas dan pada giliranya kepala sekolah kehilangan prakarsa dan inisitif untuk pengembangan kemandirian sekolah. Jadi kesimpulanya bahwa rendahnya capaian kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dasar (sampel) di Kota Makasar sebagai temuan penelitian ini, secara rasional jawabanya tersirat pada beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas.

Ketiga, sumber data dari dokumen menunjukkan bahwa proses rekrutmen kepala sekolah di Kota Makassar belum sepenuhnya mengacu pada Permen Diknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Kriteria yang dipenuhi hanya persyaratan kualifikasi akademik (S-1 atau D-4), pengalaman mengajar minimal 5 tahun, usia setinggi tingginya 56 tahun, dan pangkat dan golongan minimal III/c. Sementara itu, persyaratan bersertifikat kepala skolah atau NUKS yang diberikan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dalam hal ini LPPKS sebagai lembaga tunggal yang ditunjuk oleh Pemeritah dalam menyiapkan calon kepala sekolah melalui Diklat kepala sekolah belum menjadi syarat dalam pengangkatan kepala sekolah. Kebbijakan yang diambil dalam mengkonpensasi persyaratan Diklat kepala sekolah adalah tes kompetensi, wawancara pakar, dan uji publik. Hasil dari ketiga proses tersebut, sebelum bertugas diberikan pogram bina lingkungan berupa pendidikan karakter melalui Diklat militer selama 2 Minggu. Tujuannya antara lain pembentukan fisik yang kuat, pengendalian diri, dan patuh sama atasan (loyalitas). Diklat semacam ini tampaknya lebih bersifat non akademik, pada hal jabatan kepala sekolah merupakan jabatan akademik

profesional seperti tertuang dalam lima dimensi kompetensi kepala sekolah yang telah dibahas sebelumya. Tugas pokok kepala sekolah terbagi dalam tiga spectrum, yaitu, (1) mengembangkan sekolah, (2) meningkatkan kualitas secara terus menerus dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidika, dan (3) mengembangkan professionalisme guru dan tenaga kependidkan lainnya.

Kesimpulan yang relevan serkaitan dengan ketiga tugas pokok kepala sekolah tersebut adalah kesuksesan kepala sekolah dalam memipin sekolah bukan kekuatan fisik dan loyatis sama atasan yang menjadi syarat utama tetapi yang menjadi syarat mutlak adalah keprofesionalan akademik. Oleh karena itu pilihan kebijakan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah adalah mempersiapkan kepala sekolah secara professional. Kesimpulan ini didukung oleh hasil studi Heyneman & Loxly (1983) dalam Achmady (1995), meneliti di 29 negara: 16 negara berkembang dan 13 negara maju, menemukan empat factor yang memberi kontribusi paling menentukan mutu sekolah salah satunya adalah manajemen kepala sekolah memberi kontribusi secara konsisten sebesar 22% baik di Negara berkembang maupun di Negara maju. Jadi syarat jabatan kepala sekala masa depan bukan lagi tugas tambahan tetapi harus dipersiapkan secara akademik melalui pendidkan khusus kekepalasekolahan, seperti pendidikan profesi lainnya.

KESIMPULAN & SARAN

Secara umum (rata-rata) dapat disimpulkan bahwa dari 163 kepala sekolah dasar di Kota Makassar yang menjadi sampel penelitian ini menunjukkan tingkat penguasaan standar kompetensi kepala sekolah berada pada kategori sedang atau kategori kompeten.

Secara parsial, dari lima dimensi standar kompetensi kepala sekolah, yaitu: (1) dimensi kompetensi kepribadian, (2) dimensi kompetesi manajerial, (3) dimensi komppetensi supervise akademi, (4) dimensi kompetensi kewirausahaan, dan (5) dimensi kompetensi social, dimensi kompetensi majerial capaiannya termasuk kategori tinggi dan dimensi kompetensi kewirausahaan capaiannya termasuk kategori rendah, sementara dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi supervisi akademik, dan dimensi kompetensi social, ketiganya secara rata-rata temasuk kategori sedang atau kompeten.

Proses rekrutmen kepala sekolah dasar di Kota Makassar belum sepenuhnya mengacu pada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, karena peryaratan memiliki sertifikat kepala sekola atau Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) belum menjadi persyaratan dalam rekrutmen. Walaupun belum mmpersyaratkan sertifakat kepala sekolaha tetapi tampaknya dikompensasi dengan syarat kepangkatan. Hal itu teridentifikasi bahwa kepangkatan kepala sekolah dasar di Kota Makassar didominasi oleh golongan IV/a dan IV/b.

DAFTAR PUSTAKA

Achmady, Z. A. (1995). *Reformasi Administrasi Dalam Pendidikan: Beberapa Pelaaran Tentang Implementasi Kebijakan.* Malang: Universitas Barawijaya.

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Boardman, dkk (1961). *Democratic supervision in secondary schools*. Cambridge: Rever-side Press.

Bryk. A. & Schneider, B. (2002). *Trust in Schools*. New York, Russel Sage.

Bryk, A, Sebring, P., Karbow, D., Rollow, S., & Easton, J (1998). *Carting Chicago School Reform*. Boulder, CO, Westview Press.

Danim Sudarwan dan Suparno. (2009). *Manajemen dan Kepemimpinan Transfosional Kekepalasekolahan, Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Danim, S. (2005). *Menjadi komunitas pembelajar, kepemimpinan transformasional dalam komunitas organisasi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Day, C., Harris, Alma., Hadfied, M., Toley, H., & Beresford, J. (2000). *Leading Schools in Times of Change.* Buckingham. UK: Open University Press.

Depdiknas. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang *Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Depdiknas.

------- (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas

------- (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah.* Jakarta: Depdiknas.

Harris, Alma & Lambert Linda, 2003. *Building Leeadership Capacity For School Improvement.* Open University Press Maidenhead.Philadelphia.

Hersey, P. dan Ken Blanchard. (1986). *Manajemen perilaku organisasi*. Jakarta: Erlangga. Pidarta, M. (2004). *Manajemen pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kemendikbud LPPKS 2014, *Pelaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah/Madrasah.* Solo: LPPKS.

Keputusan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 044U/U/2002 Tentang *Acuan Pembentukan Konite Sekolah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Leith, K., Bauer, S. Riedlinger, B. (2006). *Developing ang Sustaining School Principals.* In B. Davies (Ed.), Sustaining and Developing Leaders. London Sage.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia. (2013). *Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah*. Solo: LPPKS.

McLaughlin, M. & Talbert, J. (2006). *Building School-Based Teacher Learning* Communities. New York: Teacher College Press.

Newman, F., King, B. & Young, P. (2000, April). *Professional Development that Addreses School Capacity. Paper Presented at the annual meeting of the American Education Research Associatio*n. New Orleans.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang *Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Mendiknas.

Supovitz, J. (2006). *The Case For District-Based Reform*. Cambrige: Harvard Educational Press.

Stoner, J. A.F dkk. (2000). *Manajemen*. Jakarta: PT Prenhallindo.

Soetjipto dan Raflis K. (1999). *Profesi keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryosubroto. B. (2004). *Manajemen pendidikan di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tolla, Ismail 2010, *Peranan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pendidikan*. Makalah yang disajikan pada Temu Ilmiah Internasional ISMaPI. Yogjakarta.

-------(2015). Kualitas *Leadership Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Manajmen Sekolah dan Kompensi Guru Dalam Pembelajara*. Makalah: Disajikan dalam Seminas Nasional Forum Pascasarjana UPI di Badung.

-------(2010). Manajer *Pendidikan di Era Otonoomi Daerah*. Makassar: CV. Samudra Alif.

Terry, G. R. (2001). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.